

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial ekonomi salah satu sasaran dalam pembangunan adalah diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang dan memadai untuk dapat menyerap bertambahnya angkatan kerja yang memasuki pasar kerja baru setiap tahunnya.

Angkatan kerja atau lebih dikenal dengan istilah tenaga kerja berdiri pada dua posisi penting dalam pembangunan yaitu sebagai subyek dan obyek, dalam pembangunan itu sendiri pertumbuhan penduduk secara langsung berpengaruh pada perkembangan ketenagakerjaan, yaitu bertambahnya penduduk usia kerja yang sekaligus akan meningkatkan jumlah angkatan kerja bila tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja dan pembekalan pelatihan terhadap sumber daya manusia yang berkompetensi akan menimbulkan permasalahan dalam pembangunan daerah.

Tujuan pembangunan ketenagakerjaan, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah (pasal 4 UU RI, no. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan), maka untuk memenuhi tenaga kerja yang sesuai dengan

kebutuhan pasar kerja Pemerintah melalui undang-undang RI no. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan Pasal 11 yang berisi Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

Pemerintah pusat maupun daerah dalam era sekarang ini, memiliki beberapa masalah serius dalam pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya adalah masalah ketenagakerjaan. Masalah serius dibidang ketenagakerjaan ini adalah masalah pengangguran dan terbatasnya kesempatan kerja.

Jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Sukabumi masih cukup tinggi, data tersebut tercatat sebagai berikut:

TABEL 1.1

Data Jumlah Pembuat AK1 di Kota Sukabumi pada tahun 2018

No	Pencari Kerja menurut Tingkat Pendidikan	2016	2017	2018
1	Tidak Tamat SD	-	-	-
2	SD	184	163	25
3	SMP Sederajat	1.177	983	184
4	SMA Sederajat	3.960	3.753	637
5	D.I/D.II/AKTA.I dan II, D.III	277	280	60
6	Sarjana	459	534	102
Jumlah		6.057	5.713	1.008

Sumber: Bagian Kepegawaian AK1 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Sukabumi.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai tugas di bidang pelayanan ketenagakerjaan, yang meliputi penempatan tenaga kerja (baik antar kerja antar negara, antar kerja antar daerah maupun antar kerja lokal), Pembuatan

AK.1 dan pelatihan terhadap para pencari kerja baru. Dinas Ketenagakerjaan berperan penting dalam mengatasi tingginya tingkat pencari kerja.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Sukabumi sebagai salah satu instansi yang memberikan pelayanan publik bidang ketenagakerjaan diharapkan memberikan kemudahan pelayanan informasi, penyediaan fasilitas, serta melaksanakan program-program yang menunjang karier mereka di masa depan. Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Sukabumi yaitu menyelenggarakan program pelatihan kerja. Program pelatihan kerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Sukabumi melibatkan masyarakat sebagai sasaran utama yang harus diberdayakan secara maksimal karena program tersebut mulai menunjukkan hasil yang signifikan untuk menekan angka pengangguran di Kota Sukabumi.

Peranan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Sukabumi dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang berkompetensi sejatinya telah mendirikan Unit Perogram Pelatihan Kerja yang berdasar Peraturan Walikota Sukabumi nomor. 71 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksanaan Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja.

Pemberdayaan tenaga kerja melalui Program Pelatihan Kerja merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya bagi masyarakat yang hanya memiliki tingkat pendidikan setingkat SD, SLTP/Sederajat atau SLTA/Sederajat yang biasanya memiliki keterampilan rendah dan tidak mampu melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Balai latihan kerja merupakan salah satu instrumen pengembangan sumber daya

manusia yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja produktif dengan berbagai kurikulum dan program yang ada.

Sosialisasi program pelatihan yang sudah menjangkau keseluruhan pencari kerja yang ada di Kota Sukabumi, menurut data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Sukabumi hingga akhir Maret tahun 2018 terhitung sebanyak 1.002 orang terdaftar sebagai pencari kerja, namun pendaftar pelatihan kerja rata-rata hanya 400 orang setiap tahunnya karena masih terbatas. Selain itu, kuota peserta yang ditentukan untuk masing-masing pelatihan kerja juga sangat terbatas, yaitu hanya sekitar kurang lebih 40 orang untuk satu jenis pelatihan. Program akan berjalan baik apabila masyarakat sebagai sasaran utama program memiliki peran aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Sampai saat ini, sebagian masyarakat yang hanya berorientasi pada fasilitas yang diberikan saat mengikuti pelatihan kerja, tanpa menyadari bahwa tujuan pelatihan kerja itu sebenarnya ialah untuk membekali pengetahuan dan keterampilan bagi pencari kerja. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap program pelatihan kerja dan kurangnya sumber daya dari staf juga sarana prasarana yang masih kurang memadai menjadi salah satu permasalahan yang menghambat penyelenggaraan program. Dengan demikian, pemerintah, masyarakat, dan swasta harus bekerjasama menyeimbangkan perannya masing-masing untuk mencapai tujuan program pelatihan kerja.

TABEL 1.2**Data jumlah masyarakat yang mengikuti program pelatihan kerja**

Tahun	Jenis Pelatihan					
	Menjahit	Pengelasan	Perhotelan	Tata boga	Servis Elektronik	Kecantikan
2015	20	20	-	-	20	-
2016	40	40	-	-	40	40
2017	40	40	60	40	30	-

Sumber: Bagian Kepegawaian Program Pelatihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Sukabumi

Berdasarkan Observasi awal yang dilakukan masih terdapat fenomena masalah dalam penelitian ini, Fenomena masalah tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia dari Staf kepegawaian/instruktur kepelatihan dalam menjalankan program pelatihan.
2. Kurangnya infrastruktur yang berupa sarana prasarana yang kurang memadai
3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan program pelatihan kerja.
4. Penentuan kuota pelatihan tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang ada.

Dengan demikian Implementasi Kebijakan tentang Program Pelatihan Kerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Sukabumi dapat diduga belum optimal, maka sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Impelementasi Kebijakan Program Pelatihan Kerja di Dinas Ketenagakerjan dan Transmigrasi Kota Sukabumi”.

1.2 Fokus Masalah dan Pertanyaan Pokok Penelitian

1.2.1 Fokus Masalah

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji Implementasi Kebijakan Program Pelatihan Kerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Sukabumi. Dalam pelaksanaannya penelitian ini akan berfokus pada Implementasi Kebijakan Program Pelatihan Kerja.

1.2.2 Pertanyaan Pokok Penelitian

Berdasarkan paparan pada latar belakang, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Pelatihan Kerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Sukabumi?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Program Pelatihan Kerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Sukabumi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Program Pelatihan Kerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Sukabumi?

2. Untuk mengetahui faktor pendukung penghambat Implementasi Kebijakan Program Pelatihan Kerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Sukabumi?

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan buat pemerintah daerah Khususnya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Sukabumi.
2. Sebagai acuan pedoman buat skripsi-skripsi berikutnya.
3. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu administrasi publik.